



PANDUAN WAWANCARA
“DIPLOMASI PERTAHANAN DAN DIPLOMASI HAK ASASI MANUSIA
SEBAGAI PENANGGULANGAN PERDAGANGAN MANUSIA
(STUDI INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA)”

Narasumber :

Tanggal/Waktu:

Tempat :

Pewawancara memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan penelitian. Pewawancara memohon izin untuk merekam percakapan, jika objek wawancara tidak berkeberatan, dan hasilnya hanya ditujukan untuk kegiatan penelitian. Pewawancara membuka sesi wawancara dengan membahas isu perdagangan manusia yang menimpa para ABK dan keingintahuan pewawancara tentang upaya diplomasi pertahanan juga diplomasi HAM yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah, dilanjutkan ke pertanyaan berikut.

BAGIAN I. DIPLOMASI PERTAHANAN SEBAGAI
PENANGGULANGAN PERDAGANGAN MANUSIA DI INDUSTRI
PERIKANAN

No.	Pertanyaan Kunci	Jawaban
1	Apakah lembaga yang Anda wakili telah melakukan upaya diplomasi pertahanan untuk penanggulangan kasus perdagangan manusia di industri perikanan? Jika sudah, bisa disebutkan apa saja upaya-upaya yang telah dilakukan?	
2	Apakah diplomasi pertahanan yang telah dilakukan menghasilkan kerja sama pertahanan dan keamanan yang diinginkan? Apakah CBM juga dapat tercapai?	
4	Siapa saja lembaga atau satuan tugas pemerintahan yang terlibat dalam dilaksanakannya diplomasi pertahanan?	
5	Siapa saja lembaga atau satuan tugas negara lain yang terlibat dalam dilaksanakannya diplomasi pertahanan?	
6	Apa saja hambatan-hambatan dalam melaksanakan diplomasi pertahanan dan apa saja solusi yang dibutuhkan untuk mengatasinya?	
7	Apakah upaya-upaya tersebut akan tetap dilakukan untuk ke depannya? Jika iya, dalam jangka waktu berapa lama, dan apa landasan hukum atau landasan norma dalam pelaksanaannya?	

**BAGIAN II. DIPLOMASI HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI STRATEGI
PENANGGULANGAN PERDAGANGAN MANUSIA DI INDUSTRI
PERIKANAN**

No.	Pertanyaan Kunci	Jawaban
1	Apakah lembaga yang Anda wakili telah melakukan upaya diplomasi HAM untuk penanggulangan kasus perdagangan manusia di industri perikanan? Jika sudah, bisa disebutkan apa saja upaya-upaya yang telah dilakukan?	
3	Apa saja yang dihasilkan dari upaya diplomasi HAM tersebut? Apakah menghasilkan kerja sama keamanan dan apakah kerja sama keamanan tersebut secara spesifik mengarah kepada konsep <i>human security</i> ?	
4	Menurut yang saya ketahui, pemerintah telah berupaya meyakinkan PBB untuk menggolongkan kejahatan perikanan sebagai kejahatan transnasional. Apakah hal tersebut benar? Jika benar, bisa diceritakan tentang upaya pemerintah tersebut?	
5	Siapa saja lembaga atau satuan tugas pemerintahan yang terlibat dalam dilaksanakannya diplomasi HAM?	
6	Siapa saja lembaga atau satuan tugas negara lain yang terlibat dalam dilaksanakannya diplomasi HAM?	
7	Apa saja hambatan-hambatan dalam melaksanakan diplomasi HAM dan apa saja solusi yang dibutuhkan untuk mengatasinya?	
8	Apakah upaya-upaya tersebut akan tetap dilakukan untuk ke depannya? Jika iya, dalam jangka waktu berapa lama, dan apa landasan hukum atau landasan norma dalam pelaksanaannya?	

Dalam sesi penutup, pewawancara menyampaikan terima kasih kepada narasumber; diakhiri dengan pemotretan untuk dokumentasi.